



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

H** binti P******, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kemenakan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 296/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 16 Oktober 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah tante dari F*** binti S****, umur 15 tahun (lahir tanggal 14 Oktober 2002), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama F*** binti S**** tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama T*** bin K****, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa kemenakan Pemohon yang bernama F*** binti S**** dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah

Hal. 1 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum berumur 16 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada kemenakan Pemohon yang bernama F*** binti S**** untuk bisa dinikahkan dengan T*** bin K****;

4. Bahwa antara F*** binti S**** dengan T*** bin K**** tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa kemenakan Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula T*** bin K**** masih berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada kemenakan Pemohon yang bernama F*** binti S**** untuk menikah dengan lelaki yang bernama T*** bin K****;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan kemenakannya yang masih berumur 15 tahun (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kemenakan Pemohon bernama F*** binti S**** telah hadir di persidangan dan telah memberikan

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10305/IST/CS/2011 atas nama Fitri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 4 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi:

1. N**** L**** bin L****, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan F*** binti S**** adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan kemenakannya yang bernama F*** binti S**** dengan laki-laki yang bernama T*** bin K****;
- Bahwa F*** binti S**** dengan laki-laki T*** bin K**** sudah saling kenal serta keduanya telah membina hubungan pacaran;
- Bahwa kemenakan Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga T*** bin K**** kepada keluarga Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa kemenakan Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya dan bukan karena dipaksakan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm



- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri F*** binti S**** secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
 - Bahwa T*** bin K**** selaku calon suami F*** binti S**** telah mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;
2. M***** bin B*****, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sedangkan F*** binti S**** adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan kemenakannya yang bernama F*** binti S**** dengan laki-laki yang bernama T*** bin K****;
 - Bahwa F*** binti S**** dengan laki-laki T*** bin K**** sudah saling kenal dan keduanya telah membina hubungan pacaran bahkan kemenakan Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga T*** bin K**** kepada pihak keluarga Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa kemenakan Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri F*** binti S**** secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya dan bukan karena dipaksakan oleh Pemohon;
 - Bahwa T*** bin K**** selaku calon suami F*** binti S**** telah mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan kemenakannya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada kemenakan perempuan Pemohon yang bernama F*** binti S**** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama T*** bin K**** meskipun kemenakan Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan kemenakannya dan calon suaminya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa kemenakan Pemohon (F*** binti S****) saat ini masih berumur 15 tahun dan masih berada dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kemenakan Pemohon dan calon istrinya yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara kemenakan Pemohon yang sudah

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling kenal serta kemenakan Pemohon telah baligh bahkan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu N**** L**** bin L**** dan M**** bin B****, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa kemenakan Pemohon bernama F*** binti S**** telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama T*** bin K**** tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena kemenakan Pemohon masih berusia 15 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami kemenakan Pemohon telah siap berumah tangga bersama kemenakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan kemenakan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kemenakan Pemohon telah berkenalan dengan laki-laki bernama T*** bin K**** dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan tanpa ada unsur paksaan baik dari pihak Pemohon maupun pihak calon suami kemenakan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua T*** bin K**** telah melamar kemenakan Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan dan mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena kemenakan Pemohon masih berumur 15 tahun atau masih dibawah umur 16 tahun dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemenakan Pemohon telah baligh/dewasa dan antara kemenakan Pemohon dengan laki-laki bernama T*** bin K**** tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta kemenakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar kemenakan Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia kemenakan Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemenakan Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia kemenakan Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara kemenakan Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan kemenakan Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana kemenakan Pemohon pada usia 15 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu kemenakan Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada kemenakan Pemohon, F*** binti S**** untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama T*** bin K****;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., oleh: **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Nadirah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Nadirah.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sungguminasa, 18 Oktober 2017

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

H. Hasbi, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 249/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)